

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PPKn DALAM PEMBINAAN SIKAP SOSIAL SISWA DI SMA PLUS AL-ITTIHAD CIANJUR

Sri Yanyan Mulyani¹
Yahya Mulyadi²

*henrietasri@gmail.com*¹
*yahyamulyadi@unsur.ac.id*²

Universitas Suryakencana Cianjur

ABSTRAK

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dan guru dalam merubah tingkah laku siswa. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sosial siswa. Berdasarkan tuntutan kurikulum PPKn Tahun 2013 pembelajaran harus efektif. Kenyataan lapangan berdasarkan studi pendahuluan ternyata belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut karena: 1) Siswa belum sepenuhnya memahami dan bisa menerapkan yang sudah dipelajari. 2) Siswa belum bersikap disiplin dan bersikap toleransi. Oleh sebab itu, peneliti dalam rangka penulisan Skripsi ini menelitinya. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Lokasi penelitian di SMA Plus Al-Ittihad Cianjur. Populasi terdiri atas 624 siswa kelas X dan kelas XI serta satu orang guru mata pelajaran PPKn. Sampel siswa ditarik secara acak, yakni sebanyak 93 siswa (15% dari populasi) dan sampel guru ditarik secara utuh (total sampel). Berdasarkan deskripsi data, penafsiran dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan yaitu: 1) Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembinaan sikap sosial siswa terlihat pada kegiatan siswa sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. 2) Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mampu meningkatkan sikap sosial siswa, di mana peningkatan itu terkait dengan keberhasilan meningkatkan pengetahuan sosial mereka. Disamping itu, ternyata sikap sosial dasar bagi kemunculan perbuatan sosial.

Kata Kunci: Efektivitas Pembelajaran PPKn, Pembinaan Sikap Sosial Siswa

PENDAHULUAN

Suatu Pembelajaran yang efektif itu bila membawa perubahan atau berhasil mencapai tujuan. Menciptakan hal tersebut merupakan hal yang penting untuk seorang guru untuk memulai Menentukan keberhasilan dalam sikap.

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia yang ada di muka bumi, salah satunya di Indonesia. Indonesia membangun kualitas pendidikannya melalui proses pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pendidikan Nasional adalah :

Usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa jenjang yaitu: PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan membangun mengingatkan bahwa belajar efektif itu membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan. Pembelajaran yang efektif tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi siswa. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi dapat di artikan bahwa efektivitas pembelajaran adalah bagaimana suatu pembelajaran tertentu dapat mewujudkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektif lebih mengacu pada *out put* yang telah ditargetkan. Efektivitas pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam pembelajaran karena pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu ada empat kompetensi inti yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan ringkasan atau penyederhanaan dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) hanya terfokus pada empat inti yaitu (1) Pancasila, (2) Undang-undang Dasar 1945, (3) Bhineka Tunggal Ika, (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang ada disetiap jenjang sekolah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di jenjang SMA/MA/SMK/MAK bertujuan sikap, membangun karakter dan kebudayaan bangsa. Di jenjang SMA sederajat bukan lagi membangun tapi membina sikap siswa. Sikap siswa yang dituntut di sekolah yaitu sikap spiritual dan sikap sosial.

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa: "kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Dalam kurikulum 2013 Lampiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa yang harus dicapai oleh siswa untuk mata tidak memihak, konstitusi, nilai serta norma dalam masyarakat.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan intelektual contohnya dalam merespon berbagai persoalan politik di lingkungan sekolah bagi siswa dan lingkungan masyarakat bagi orang dewasa. Sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) bisa disebut juga watak atau sifat warganegara. *Civic disposition* ini harus dimiliki oleh setiap warganegara, karena dengan ini setiap warganegara akan mampu menjadi warganegara yang tegas dan juga mampu menyikapi situasi dan kondisi negara ini, minimal mampu memahami atau menyikapi lingkungan sekitar untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan cerdas (*be smart*). Oleh karena itu kompetensi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dikembangkan untuk mendorong siswa memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Semua itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab, hak asasi manusia, prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum (*role of law*) dan peradilan yang bebas dan sama, dapat bersaing secara positif, mampu berbagi pada yang lain, memiliki hasrat pada penerimaan sosial, bergantung secara positif pada orang lain dan memiliki sifat kelekatan (*attachment behavior*) yang baik (Lydia, 2012:99).

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini harus tersampaikan dengan baik dan efektif oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karena mata pelajaran ini memiliki peranan penting mewujudkan tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil observasi mengenai sikap sosial, saya teringat kepada banyak hal salah satunya Al-Ittihad *Boarding School*, yang dimana terdapat beberapa jenjang sekolah, mulai

dari SMP sampai Memiliki sikap sosial siswa sangat penting sekali karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain dan saling berkesinambungan, dari hal ini sudah dapat disimpulkan bahwa pendidikan PPKn sangatlah penting untuk membangun sikap sosial siswa.

Dengan sikap sosial akan membangun interaksi dan komunikasi dengan orang lain, sehingga akan timbul kerja sama dari kedua belah pihak dan akan membentuk karakter yang satu dan yang lainnya saling berhubungan dan ketergantungan, sehingga akan menciptakan hubungan yang saling menghargai dan menghormati.

Setiap orang dalam memaknai efektifitas memberikan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) efektifitas merupakan suatu seberapa jauh target dapat dicapai. Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1996: 126) efektifitas yaitu berkenaan dengan sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau di inginkan yang dapat terlaksana atau tercapai. Sedangkan menurut Mulyasa dalam Theresia Inung (2012: 12) berpendapat mengenai efektifitas yaitu: Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang di tuju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya.

Perguruan Tinggi (PT) seperti: SMP Plus AL-Ittihad, SMA Plus Al-Ittihad, SMK Plus Al-ittihad dan Perguruan Tinggi STAI Al-Ittihad. Dengan ribuan siswa dan siswinya ini mempersulit mereka untuk berinteraksi di tambah dengan jadwal mereka yang padat samapai malam. Melalui penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana efektifitas pembelajaran PPKn dalam pembinaan sikap sosial siswa di SMA Plus Al-Ittihad Cianjur.

LANDASAN TEORI

Teori merupakan serangkaian tes dan penilaian yang dirancang untuk mengetahui secara pasti apakah sasaran perilaku dari suatu program pendidikan secara interen telah valid. Efektivitas dilihat dari proses dan juga evaluasai menurut Firman (2009) dalam Theresia Inung (2012: 12) menyebutkan bahwa :Evaluasi dapat digunakan dalam mengukur tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Selanjutnya evaluasi yang baik dilaksanakan hanya apabila didasarkan

rencana yang baik pula. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi dalam kaitannya dengan mengukur efektivitas harus mengukur untung, rugi, tidak hanya mengukur pencapaian sasaran beda.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat tersimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang dikehendaki yang merupakan akibat dari yang dikerjakan merupakan suatu pengukuran terhadap tercapainya dalam usaha mewujudkan tujuan oprasional. Efektivitas pendidikan pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan sistem dan dimensi waktu. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas menggunakan teori sistem.

Berkaitan dengan efektivitas dapat dijadikan barometer atau dapat dijadikan tolak ukur guru-guru untuk mencapai sebuah keberhasilan pendidikan. Dalam sebuah pengukuran pasti akan ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh setiap komponen baik guru atau siswa, dalam pengukuran ini ada dua hal validasi dan evaluasi. Menurut Rae dalam Theresia Inung (2012: 12) mengungkapkan bahwa: Validasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu interen dan ekteran. Validasi interen merupakan serangkaian tes dan penilaian yang dirancang untuk mengetahui secara pasti apakah suatu program pendidikan telah mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun valisasi eksternal dengan sikap, serta hasil yang berhubungan dengan keadilan dan kesamaan.

Indikator *income*

Indikator *income* ini meliputi jumlah lululasn keningkat pendidikan berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi dan pekerjaan serta pendapatan. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Sudjana (2004: 28) pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi interaksi *edukatif* antara dua pihak, yaitu antara siswa (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.

Menurut Dimiyati dan Mudjiono (Syaiful Sagala, 2011: 62) saran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Efektivitas memiliki kriteri yang dimana mencerminkan keseluruhan siklus *input*, proses dan *output*. Adapun menurut Mulyasa

dalam Theresia Inung (2012: 5) antara lain meliputi indikator *input*, proses, *output* dan *income*". Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Indikator *input*; indikator *input* ini meliputi karakteristik guru, fasilitas perlengkapan, dan materi pendidikan serta kapasitas manajemen.
- b) Indikator proses; indikator proses meliputi perilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik.
- c) Indikator *output* ; indikator dari *output* ini berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta didik, dan dinamikanya sistem sekolah, hasil-hasil yang berhubungan dengan prestasi belajar, dan hasil-hasil yang berhubungan tingkahlaku dalam individu.

Hasil pembelajaran di tandai dengan adanya perubahan perilaku individu secara keseluruhan. Pembelajaran merupakan suatu proses. Ini mengandung makna bahwa pembelajaran merupakan suatu aktifitas yang berkesinambungan. Pembelajaran itu karena adanya suatu yang mendorong dan tujuan yang harus dicapai. Pembelajaran merupakan suatu pengalaman. Efektivitas pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian siswa. Menurut Karwono (2009) dalam Theresia Inung (2012: pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan sekelilingnya.

Ada empat karakteristik dari mengajar yang efektif, yakni :

1. Penampilan pengajar (penguasaan bahan ajar), persiapan mengajar, dsb.
2. Cara mengajar (pemilihan model intruksi, alat bantu mengajar dan evaluasi yang dipakai)
3. Kompetensi dalam mengajar
4. Pengambilan keputusan yang bijaksana

Jika diperhatikan, pengajaran akan menjadi efektif bila pengajar menguasai:

- 1) Apa yang diajarkan

- 2) Teori pengajaran (pemilihan *instructional design*) yang relevan
- 3) Hal-hal baru (penelitian untuk memperkaya isi bahan ajar yang diberikan
- 4) Karakteristik siswa

Dengan demikian dalam hal ini keefektifan pembelajaran adalah pembelajaran yang didalamnya terdapat pemanfaatan potensi yang mampu sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Medley dalam Soekartawi (1995:38) mendefinisikan efektivitas pembelajaran sebagai berikut: Pertama, efektivitas dirasakan sebagai kemuliaan karakteristik atau sifat pribadi tertentu yang dimiliki oleh guru. Kemudian, efektivitas tidak terlalu terlihat sebagai suatu fungsi karakteristik guru tetapi sebagai suatu metode mengajar yang digunakan. Maka, efektivitas sangat bergantung pada suasana kreatif dan penegakan disiplin seorang guru di dalam kelas.

Kurikulum

Menurut Oemar Hamalik dalam Danial & Djuherman (2013: 1) mengemukakan bahwa: Pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan lama (tradisional), dan pandangan baru (modern). Pandangan lama (tradisional); merumuskan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Pengertian ini memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran sendiri pada hakekatnya adalah pengalaman nenek moyang pada masa lampau, yang dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga muncul mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu hayat, dan sebagainya.
2. Mata pelajaran adalah sejumlah informasi atau pengetahuan, sehingga penyampaian mata pelajaran pada siswa akan membentuk mereka menjadi manusia yang berbudaya.

Menyinggung dari pendapat di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah mengalami perubahan atau perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat

dilihat dalam substansi kurikulum PPKn yang merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum berupa rencana pengajaran, mata pelajaran dan telah menempuh suatu jarak dan akhirnya mencapai *finish*.

Secara umum tujuan PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni:

1. Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan komitmendan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civiccommitment, and civic responsibility*);
2. Pengetahuan kewarganegaraan
3. Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi mempunyai kecerdasan berpikir.
4. Mata pelajaran menggambarkan kebudayaan masa lampau. Adapun pengajaran bearti penyampaian kebudayaan kepada generasi muda.
5. Tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah. Ijazah diposisikan sebagai tujuan, sehingga menguasai mata pelajaran bearti telah mencapai tujuan belajar.
6. Adanya aspek keharusan bagi setiap siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang sama. Akibatnya faktor minat dan kebutuhan siswa tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum.
7. Sistem penyampaian yang digunakan oleh guru adalah sistem penguangan (*imposisi*). Akibatnya, dalam kegiatan belajar gurulah yang lebih aktif, sedangkan siswa yang pasif.

DATA ANALISIS

Berdasarkan data yang terkumpul peneliti menemukan sebagian besar (62%) responden atau sebanyak 58 orang siswa menyatakan sangat setuju bahwa pembelajaran PPKn dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa dan lebih setengahnya (50%) responden atau sebanyak 47 orang siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran PPKn menuntut siswa untuk mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena terbukti dengan data dari beberapa angket yang diajukan oleh penulis, lebih setengahnya siswa menjawab pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap sikap sosial siswa. Menurut Dasim Budimansyah (2007: 31) dituliskan bahwa: Kompetensi penguasaan bahan ajar pada PPKn mencakup 3 aspek yaitu, memahami pengetahuan kewarganegaraan (*civicknowledge*), memahami keterampilan kewarganegaraan (*civic skill* dan memahami watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Untuk *civic* pengetahuan khusus pada sub nilai, moral dan norma. Pendapat lain diungkapkan oleh Baranson dalam Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 55-61) yang mengatakan bahwa “Untuk mengembangkan kompetensi PPKn diperlukan tiga komponen utama yaitu Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic* merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Lalu dalam sikap sosial siswa itu ada toleransi (74%) setiap individu mempunyai sikap toleransi.

Selain didukung oleh angket, hipotesis ini didukung pula oleh hasil wawancara yaitu berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat bagus, sehingga pengetahuan siswa, keterampilan serta terbentuknya sikap sosial siswa.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peneliti seperti diungkapkan dalam deskripsi data, penafsiran data, dan penemuan-penemuan peneliti dapat diketahui bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap sikap sosial siswa.

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu (Saifuddin Azwar, 2005: 30). Di dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu

sebagai anggota dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya dan terjadi secara berulang-ulang. Sebagai contoh, rasa bela sungkawa terhadap orang lain yang sedang terkena musibah. Selain itu, rasa menghargai dalam suatu kelompok untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam pembentukan sikap social ini memiliki beberapa faktor yaitu faktor-internal dan eksternal. Menurut Bimo Walgito (2003:135-136) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap itu, adalah:

1. Faktor Intern: faktor yang menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, tidak semuanya dapat diterima. Individu mengadakan seleksi mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolaknya. Berkaitan erat dengan apa yang telah ada dalam diri individu untuk menanggapi pengaruh dari luar. Hal ini Kewarganegaraan dalam pembinaan sikap sosial siswa terlihat pada kegiatan siswa sehari-hari dilingkungan sekolah maupun di dalam kelas.
2. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat meningkatkan sikap sosial dengan baik. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mampu meningkatkan sikap sosial siswa. Peningkatan tersebut terkait dengan peningkatan pengetahuan sosial mereka. Disamping itu, ternyata sikap sosial dasar bagi kemunculan perbuatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Danial, E. & Djuherman. (2013). *Perkembangan Kurikulum*. Universitas Suryakencana Cianjur
- Darajat, Zakiah. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Sarwono. W. S. & Meinarno. A. E. (2011). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Sagala, Syaiful. (2010). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta. Aksara.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Walgito, Bimo. (2003). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar* Yogyakarta : Andi Offset.
- Gerungan, A, W. (1991). *Psikologi Sosial*. Bandung : PT Eresco

- Kusumaningtyas, Lydia. (2012). *Membentuk Sikap Sosial Anak TK Melalui Permainan Kelompok*. Jurnal Ilmiah Widya Wacana, (online), 8 (1):99, <http://www.ejurnal.unisri.ac.id> diakses 1 Januari 2012.
- Partini, Siti. (1973). *Psikologi Sosial*. Study Yogyakarta
- Purwanti, I. T. (2012). *Efektivitas Pembelajaran Kewarganegaraan Sebagai Usaha Penanaman Nilai Dan Norma Pada Siswa Di SMK Wasis Jogonalan Klaten Tahun 2007-2009* (Skripsi). Surakarta Universitas Sebelas Maret.